

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2017, *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal*, Malang; UIN-Maliki Press.

Happy Susanto, 2008, *hak-hak konsumen jika dirugikan*, Jakarta : Visimedia.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Maman Ukas, 2004, *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Penerbit Agnini.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Nazir, Habib, and Muhammad Hasanuddin, 2004, *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit.

Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung: Univerrstas Lampung.

Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Sidobalok, J.,2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumarji Gatot Irianto, 2013, *Pedoman Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP)*, Jakarta: Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian,

W Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo.

II. JURNAL

Berlian Fajar Latifa Noor, Suradi, Rinitami Njatrijani, Pelindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi Di Kudus, *Jurnal Hukum* Vol.5 No.2, 2016

Chindy Yapin, Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640K/Pid.Sus/2016)

David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 2021, Vol 8 No. 8.

Misrah, Sudarmi, dan Samsir Rahim, *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida)*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020

Ni Putu Mahya Hasinu Darapalgia, Desna Aromatica, Roni Ekha Putera, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang, *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.3 No.2 2021

Nina Jayanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2, 2019

Rifani, Mita Nila. 2019. Dampak Penggunaan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Sawah. *Jurnal Neo Societal*, Vol. 4 No.3

Santoso, P., Suryadi, A., Herman, S., & Latulung, B. V. 2005. Dampak Teknologi Sistem Usaha Pertanian Padi Terhadap Peningkatan Produksi Dan Pendapatan Usahatani Di Jawa Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 8(1)

Sharyanto, I, *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*. *Jurnal Konstitusi*, 2018, Vol.15 No.3.

Sumarni, *"Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan dan Penolakan di Bidang Ekonomi"*, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.1, No.2, 2013.

III. Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
4. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
6. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 734 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023
7. Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian No.45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

IV. WEBSITE

Mengenal Harga Eceran Tertinggi dalam Penjualan Produk, <https://accurate.id/bisnis-ukm/harga-eceran-tertinggi/> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 20.39 WIB

Awal 2023, Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subsidi; <https://bumn.go.id/media/news/detail/awal-2023-pupuk-indonesia-siapkan-stok-pupuk-subsidi> di akses pada 22 januari pukul 12.51 wib

Kebijakan Baru tentang Pupuk Bersubsidi pada Permentan No. 10 Tahun 2022, <https://ciamiskab.go.id/portal/> di akses pada 17 januari 2023 pukul 14.17 wib

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, di akses pada 15 juni 2023 pukul 10.33 wib

Rapat koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Dinas Pertanian Sumbar; <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news> di akses pada tanggal 20 juni 2023 pukul 21.19 wib

